

MEMBANGUN BASIS SOSIAL TNI AD DALAM KONTEKS KETAHANAN NASIONAL

Armaidy Armawi*)

Perkembangan politik yang berlangsung dalam lingkungan nasional saat ini cenderung menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan khususnya TNI AD pada posisi yang makin rentan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dari berbagai pihak dalam melihat TNI sebagai salah satu aset bangsa yang perlu dipelihara eksistensi dalam menegakkan kedaulatan bangsa dan negara. Era perubahan ini menuntut TNI AD sebagai salah satu kekuatan pertahanan negara perlu mengambil posisi yang sesuai dengan tuntutan reformasi.

Selain itu kondisi ini sangat dipengaruhi juga oleh perkembangan lingkungan strategis yang cenderung menuntut peran TNI AD sebagai komponen bangsa yang sangat penting agar lebih tanggap dalam mengantisipasi setiap isue yang berkembang menyangkut pertahanan nasional, yang selama ini telah dilakukan melalui strategi pembinaan teritorial.

Dalam realitasnya, pertahanan Indonesia selalu terkait dengan geopolitik dan geostrategi, karena perubahan-perubahan yang terjadi di luar dan di dalam negeri dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dari perempat akhir abad ke-20 berdampak sangat luas pada bidang pertahanan dan keamanan. Secara tradisional keamanan tradisional hanya dipandang sebagai masalah pertahanan dan keamanan saja, sedangkan per-

ubahan-perubahan yang terjadi telah meluas cakupannya, baik secara vertikal maupun horisontal. Secara vertikal lingkup keamanan nasional telah melampaui skala nasional karena menyangkut keamanan internasional, disamping dalam skala domestik juga berkaitan dengan keamanan individu. Bahkan bobot keamanan individu dapat melampaui kepentingan negara (Wahyono, 2000).

Untuk memperkuat basis so-

*) Dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

sial TNI AD, ternyata diperlukan pemahaman yang lebih mendasar tentang pengaruh dari perkembangan lingkungan strategi tersebut guna membangun basis sosial yang lebih kokoh. Kondisi ini juga ternyata tidak lepas dari pengaruh dalam maupun luar negeri sehingga muncul berbagai persoalan mendasar yang mengandung kerawanan yang sangat tinggi dalam memelihara integrasi nasional.

Mengingat kondisi lingkungan nasional juga sedang dihadapkan pada fenomena politik, ekonomi, sosial-budaya, dan keamanan yang rentan terhadap disintegrasi dalam masyarakat, sehingga untuk menghadapi perkembangan ke depan yang diperlukan yaitu peranan TNI AD harus lebih profesional, efektif, efisien, dan modern (PEEM). Tuntutan perkembangan ini merupakan kebutuhan yang memerlukan dukungan serta pengaturan yang lebih tegas dan jelas sesuai tuntutan reorientasi TNI AD di era reformasi.

Salah satu persoalan penting yang terkait dengan upaya mengelola kekuatan TNI AD yaitu perlu memperkuat basis sosial, sehingga jarak sosial yang terbentuk semakin jauh pada saat ini akan kembali dekat (kohesivitas sosial) dengan keberadaan TNI AD. Fenomena ini menjadi penting karena terkait dengan

upaya mengelola "Ketahanan Nasional" bangsa dan negara, yang sesungguhnya menuntut kualitas sumberdaya manusia agar menjadi kekuatan yang handal.

Walaupun telah terjadi perkembangan pada waktu-waktu yang silam bahwa, TNI selalu berjuang untuk membina kemanunggalannya dengan rakyat, tetapi realitas menunjukkan bahwa, kondisi tersebut belum dapat menciptakan suatu kekuatan yang solid. Kemanunggalan yang dibangun masih bersifat semu, sehingga basis sosial bagi TNI AD yang sesungguhnya berada pada kekuatan rakyat, cenderung jauh dari kebutuhan yang hendak diciptakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sogara (1995) dikemukakan bahwa, melalui kegiatan TMD (Tentara Masuk Desa) di Sumba Barat selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat tanpa mengabaikan aspek keamanan, TMD dirasakan pula manfaatnya dalam mempererat keakraban TNI dengan rakyat (kohesivitas sosial) serta dapat menghilangkan rasa takut yang mencekam sebagai dampak diterapkannya strategi stabilitas. TMD sebagai legitimasi baru dari peran TNI guna meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam menghadapi berbagai ancaman,

tantangan, hambatan, dan gangguan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Ancaman dan tantangan itu dapat berupa kemiskinan, kebodohan, kesenjangan dibidang sosial, ekonomi dan politik yang dapat membahayakan identitas, integritas bangsa dan negara kesatuan Indonesia.

Baik saat ini maupun masa depan, peranserta TNI AD sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan nasional, perlu memainkan peran sosial yang lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat sebagai suatu kebutuhan dan bukan keinginan yang harus dikejar. Krisis nasional yang melanda Indonesia saat ini, telah menempatkan peran sosial dari TNI pada kondisi yang makin retan.

Untuk itu yang sangat dibutuhkan bagi TNI AD pada saat ini dan masa depan yaitu, perlu memperkuat basis sosial dengan kembali mengabdikan kepada kepentingan rakyat, tanpa memandang perbedaan baik suku, agama, dan golongan yang terdapat di Indonesia. Basis sosial yang solid perlu dibangun berdasarkan sistem nilai baru yang saat ini tengah mengalami perkembangan, tetapi peran TNI AD harus tetap berpedoman pada doktrin dan budaya militer Indonesia. Artinya membangun basis sosial yang solid bagi perkem-

bangsan masa depan TNI AD perlu dilakukan secara hati-hati, dan hal ini perlu dilakukan secara bertahap dan terencana melalui suatu proses, dan tidak secara tergesa-gesa sehingga jati diri TNI AD sebagai bagian dari TNI tetap terpelihara secara baik.

Membangun basis sosial yang solid bagi TNI AD perlu pemahaman secara mendalam terhadap perkembangan dari berbagai isue sentral yang mencuat ke permukaan saat ini seperti, demokratisasi, HAM, lingkungan, dan lainnya. Apabila isue yang berkembang tidak dapat dicermati secara benar dan tepat, niscaya peran TNI AD dalam menanggapi tuntutan rakyat akan semakin jauh, dan faktor ini dapat melemahkan posisi TNI AD dimata rakyat.

TNI AD Memperkecil Jarak Sosial (*Social Distance*)

Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlangsung saat ini menunjukkan adanya suatu kecenderungan bahwa, makin merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap TNI dan khususnya TNI AD. Kondisi ini disebabkan karena pada waktu yang lampau terdapat implementasi yang menyimpang (bias) dari jiwa sosial politik ABRI. Bergesernya ide dasar tentang fungsi sosial politik ABRI telah menempatkan

posisi TNI AD pada saat ini makin jauh dari basis sosialnya yaitu rakyat.

Untuk memperkecil jarak sosial (*social distance*) yang kian melebar tersebut membutuhkan ide-ide dasar yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan. Dalam kehidupan suatu *nation state* seperti Indonesia, menuntut peran TNI AD yang dekat dengan basis sosialnya yaitu rakyat. Hal ini disebabkan karena kekuatan utama dalam mendukung TNI AD adalah rakyat sehingga rakyat juga menghendaki agar TNI AD selalu dekat, dan bisa mengetahui dan memahami tentang berbagai persoalan yang mereka rasakan dalam segenap aspek kehidupannya.

Melalui upaya memahami secara benar tentang berbagai persoalan yang dihadapi oleh rakyat, maka akan terwujud suatu kohesivitas sosial yang baik diantara komponen tersebut. Sampai saat ini Indonesia masih mengalami perkembangan yang lamban karena basis rakyat yang berporos pada kehidupan mereka sebagai petani dan nelayan yang menghuni kepulauan nusantara belum banyak mengalami perubahan yang signifikan.

Kondisi rakyat pada lapisan ini sangat rentan terhadap kemiskinan yang mereka alami

sendiri, dan kapan semua ini akan berakhir masih merupakan misteri yang perlu dikaji secara mendasar dan rawan keamanannya. Menurut Habib (1998) persoalan yang berkaitan dengan konsep keamanan juga mencakup ancaman terhadap ketentrangan dan keamanan hidup manusia sehari-hari (keamanan manusia) seperti kemiskinan, kebodohan, penyakit menular, pengangguran, diskriminasi politik-ekonomi-sosial, degradasi lingkungan, kejahatan terorganisir dan lain sebagainya. Pengertian keamanan menjadi semakin luas, menjadikan keamanan komprehensif yang bersifat multi-dimensional.

Sesungguhnya melalui pemahaman tentang derita kemiskinan yang dialami oleh petani dan nelayan, disitulah TNI AD dapat mengambil peran sosial yang lebih solid untuk memperkuat basis sosial. Ketika mereka berada di saat-saat krisis seperti ini TNI AD harus dapat mencermati secara benar apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka butuhkan. Sekali lagi bukan apa yang TNI AD inginkan. Hal ini menjadi penekanan penting karena dapat menepis berbagai situasi yang berkembang negatif dan bisa menyudutkan TNI AD pada posisi yang kurang menguntungkan.

Mereka yang berada pada lapisan paling bawah sebagai petani dan nelayan miskin di desa-desa, dan daerah tertinggal lainnya masih membutuhkan berbagai uluran tangan dari berbagai pihak yang secara sukarela dapat membantu mereka. Apabila kondisi ini dapat dilakukan secara baik, niscaya basis sosial yang pokok bagi TNI AD dapat dibangun lebih kokoh.

Penekanan ini menjadi sangat penting karena kondisi yang makin rentan saat ini di Indonesia ternyata telah menimbulkan berbagai persoalan baru yang tidak terbayangkan sejak awal. Reformasi sudah cukup banyak menelan korban dan menimbulkan penderitaan bagi rakyat karena munculnya berbagai keresahan sosial dan cenderung menimbulkan konflik vertikal dan horisontal di dalam masyarakat sehingga dapat menurunkan citra dari semua komponen bangsa, terutama bagi kalangan seperti Pemerintah, TNI, Elit Politik, dan sebagainya.

TNI AD yang selama ini berada dalam sistem ini tidak akan lepas dari pengamatan masyarakat, tentang baik maupun buruk. Untuk itu dengan kembalinya TNI AD kepada basis sosialnya yang semula yaitu rakyat, niscaya akan menempatkan TNI AD pada jarak sosial yang makin dekat dengan basis sosial tersebut.

TNI AD Membangun Kohesivitas Sosial Yang Solid

Kedudukan wilayah Indonesia yang berada pada posisi silang dunia selalu menuntut TNI AD agar mampu mengembangkan strategi pertahanan yang solid untuk menjaga keutuhan teritorial wilayah dalam kedaulatan negara. Kondisi ini pun menuntut keterpaduan (*integrated*) di antara berbagai komponen bangsa terutama di kalangan TNI.

Perkembangan masa depan menunjukkan kecenderungan sangat kuat bahwa, kedaulatan negara dan bangsa sulit untuk dihancurkan melalui kekuatan dari luar melalui aktivitas intervensi. Tetapi kondisi ini dapat berupa ancaman langsung apabila muncul dari dalam negeri, melalui tuntutan pemisahan diri dari wilayah kedaulatan negara. Artinya bagi Indonesia, potensi disintegrasi bangsa dan teritorial yang muncul dari dalam akan merupakan persoalan baru yang sangat mengerikan, apabila basis sosial TNI AD semakin jauh dari realitas.

Kohesivitas sosial utama yang harus dibangun yaitu secara internal ditubuh TNI AD sendiri harus tetap mampu melakukan upaya harmonisasi secara optimal terhadap TNI AL, TNI AU, dan POLRI, baik secara organisasi maupun dalam pembinaan

personilnya lebih profesional. Secara eksternal unsur-unsur TNI perlu mengembangkan strategi ke depan untuk membangun kohesivitas sosial yang solid dengan rakyat, maupun elemen bangsa yang lainnya sehingga tercipta kondisi yang lebih *integrated*, sehingga menuntut peran TNI AD agar lebih mengedepankan citra dirinya dalam menjamin keutuhan teritorial.

Pengembangan kekuatan TNI yang diperlukan yaitu mampu menciptakan keseimbangan serta memberikan kesempatan kepada komponen terkait lainnya agar mampu memacu prestasi menuju puncak sesuai hirarkhi yang dilembagakan dalam kalangan TNI. Melalui pemberian kesempatan yang sama dan demokratis bagi setiap komponen TNI, berarti TNI AD telah mampu mempelopori sesuatu yang baru dan dibangun atas dasar inovasi yang kuat.

Proses sosialisasi terhadap ide tersebut tidak mudah, tetapi kondisi yang berkembang di era reformasi merupakan suatu kebutuhan bagi TNI dan khususnya TNI AD perlu melakukan reorientasi ke depan secara hati-hati. Namun hal ini perlu dimulai, karena baik atau buruknya kondisi masa depan bagi keutuhan negeri ini sangat tergantung dari apa yang sesungguhnya dilakukan pada saat ini. Tuntutan di era

reformasi yang menghendaki TNI perlu melakukan reorientasi ke masa depan lambat atau cepat akan menciptakan suatu kohesivitas sosial yang ulet dan tangguh sehingga akan memperkuat ketahanan nasional bangsa dan negara.

Sorotan terhadap persoalan kohesivitas sosial yang perlu dibangun dari kalangan TNI AD sebagai salah satu kekuatan militer yang seimbangan dengan matra laut, dan matra udara untuk mencapai kemampuan yang tinggi perlu didukung oleh penciptaan kondisi ekonomi, teknologi, industri, keuangan nasional yang memadai. Kohesivitas sosial yang dibangun tersebut secara jelas membutuhkan anggaran pembangunan yang realistis dan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

Upaya membangun kohesivitas sosial tersebut tetap membutuhkan fungsi pembinaan teritorial yang selama ini dilakukan oleh TNI AD dapat mewujudkan fungsi pertahanan negara yang lebih kokoh. Fungsi teritorial yang perlu dikembangkan dalam kaitan dengan membangun kohesivitas sosial tersebut yaitu, berada dalam komando wilayah dan perlu diingat bahwa komando wilayah tersebut tidak ada sangkut paut dengan wewenang pemerintahan dalam negeri.

Upaya ini perlu dibedakan dengan kondisi yang berlangsung pada masa lalu dalam melaksanakan fungsi teritorial yang hanya bertumpu pada unsur pertahanan saja. Tetapi yang dimaksudkan adalah pertahanan dalam arti luas untuk mewujudkan berbagai bidang kehidupan nasional tertata secara terpadu.

Kohesivitas sosial yang solid akan dapat terwujud melalui peran TNI AD sebagai pilar penting dalam pertahanan negara, membutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai elemen bangsa. Namun yang terpenting di sini yaitu, proses sosialisasi terhadap ide tersebut sehingga harus dapat mengalir secara baik, dan tidak menimbulkan guncangan yang serius dikalangan TNI sendiri, dan terutama antara TNI dengan rakyat yang saat ini kurang mendapat simpati.

Terciptanya kohesivitas sosial membutuhkan keberanian untuk mengakui apa yang baik dan jelek yang pernah dilakukan. Artinya dengan penuh rasa kejujuran mengatakan bahwa TNI AD telah mampu melakukan koreksi, dan sudi menerima berbagai kritik yang mengalir untuk kemudian memperbaikinya demi menjamin keutuhan bangsa dan negara. Secara teoritis hal ini memang sulit dilakukan, tetapi realitas yang nampak menun-

tut TNI AD harus dapat melakukannya demi loyalitas kepada negara, rakyat, dalam mewujudkan kepentingan nasional yang hakiki yaitu terciptanya integrasi nasional.

Dalam analisis tentang Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia, Britton (1996) telah mengingatkan bahwa, Angkatan Darat dapat menampilkan dirinya berada di atas kepentingan golongan, sebagai penyelamat nasional yang bertugas untuk memulihkan integritas nasional, dan sekaligus sebagai suatu kekuatan modernisasi yang efisien. Yang tersirat - dan kadang-kadang terungkap dalam tuntutan-tuntutan ini adalah pandangan yang lebih mendasar bahwa Angkatan Darat Indonesia merupakan suatu tatanan lembaga masyarakat yang lebih tinggi, dan bahwa para perwiranya yang bertindak sebagai *satria* merupakan perwujudan dari kebijaksanaan dan moralitas yang lebih tinggi.

Melalui pemahaman seperti diatas, diperlukan pemahaman terhadap berbagai persoalan yang berkembang saat ini dihadapi oleh bangsa dan negara yang cenderung mengarah menjadi kebringasan sosial. Munculnya udaya kekerasan di berbagai kawasan dan cenderung mengarah pada disintegrasi moral dalam masyarakat telah menem-

patkan TNI AD sulit mengambil pilihan yang terbaik. Mengapa terjadi seperti itu? karena basis sosial TNI AD yang solid belum terbentuk dan terwujud, sehingga antara TNI AD dan masyarakat cenderung berada pada kondisi yang saling curiga, dan menipisnya kepercayaan masyarakat. Kondisi ini makin terasa sulit karena peranan Pemerintah yang memperoleh legitimasi belum mampu berbuat banyak untuk memenuhi keinginan masyarakat.

Untuk memperkuat basis sosial yang diperlukan dari TNI AD adalah segera mensosialisasikan gerakan moral untuk mengembalikan kepercayaan diri sebagai simbol negara melalui penegakkan hukum, HAM, dan bertindak secara adil. Selain itu tanamkan kesadaran kepada masyarakat melalui strategi pembinaan teritorial untuk patuh kepada hukum dan menghormati hak asasi manusia secara nasional, agar secara ke luar maupun ke dalam, keberadaan TNI AD tetap dapat diterima sebagai komponen bangsa yang memiliki wibawa untuk menjamin kedaulatan negara dan bangsa.

Basis Sosial TNI AD Dalam Konteks Ketahanan Nasional

Bertolak dari pemahaman tentang teritorial (*territorial aware-*

ness) adalah sebagian dari permukaan bumi atas daratan, perairan dan ruang udara dengan batas-batas yang ditetapkan oleh suatu negara sebagai wilayah nasionalnya dengan segenap isinya yang ada dalam ruang semesta negara, baik materil, spirituil maupun tenaga manusia dalam bentuk perikehidupan sosial sebagai keseluruhan (Mabes AD, 1997). Melalui pemahaman tentang penyangga negara bagi Indonesia sebagai negara berkembang adalah rakyat yang hidup pada lapisan bawah sebagai petani dan nelayan, maka di situlah sumber ketahanan bangsa dan negara yang perlu dikelola secara optimal.

Untuk memperkuat basis sosial tersebut agar dapat menciptakan ketahanan nasional, maka pemahaman tentang ketahanan nasional yang mengacu pada konsep kemampuan bangsa untuk menghadapi situasi krisis, baik berupa kegoncangan dalam negeri, maupun serangan oleh pihak lain dari luar, digambarkan sebagai sesuatu yang tidak hanya didapatkan dari kekuatan militer, tetapi juga dari kekuatan-kekuatan non-militer sebagaimana ditunjukkan oleh ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya bangsa (Dorodjatun dan Simatupang dalam Chin Kin, 1989).

Basis sosial yang perlu dibangun untuk menciptakan ketahanan nasional yaitu tetap berporos pada pembinaan teritorial. Dalam pembinaan teritorial yang terpenting di sini adalah kemampuan membina sikap dan perilaku teritorial, baik itu di kalangan masyarakat maupun aparatur negara khususnya aparat teritorial. Selama ini yang kurang dipahami dalam pembinaan teritorial yaitu pemahaman tentang pengaruh dari sikap dan perilaku sosial yang muncul dari watak etnik di setiap wilayah. Fenomena ini sesungguhnya tergolong rawan terhadap keamanan dan rentan terhadap konflik sosial, baik itu yang bersifat horisontal maupun vertikal yang dapat melibatkan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.

Penekanan tentang sikap dan perilaku teritorial (*territorial behavior*) dimaksudkan agar dapat menepis berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat seperti, terorisme sosial, sabotase, infiltrasi, subversi intelektual, dan kondisi lain yang sementara marak saat ini yaitu berkembangnya militerisasi di kalangan masyarakat sipil. Semua fenomena yang dikemukakan di atas sangat terkait dengan upaya membangun basis sosial yang lebih kuat karena banyak sekali kepentingan terkait di sana.

Kondisi lain yang memerlukan perhatian ke depan juga yaitu, gencarnya masyarakat dalam menerapkan otonomi daerah. Dalam kasus ini ke depan yang perlu dikaji lebih mendasar yaitu, apabila pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi salah urus dapat berpotensi memunculkan suatu penguatan otonomi kesukuan, etnis yang lebih kental. Untuk itu TNI AD dalam visi dan misi untuk membangun basis sosial yang lebih kuat, perlu mengantisipasi berbagai kondisi yang berkembang dari sikap dan perilaku teritorial dari masyarakat yang kurang memahami tentang kondisi budaya, sosial, yang cenderung arogan.

Banyak contoh menunjukkan bahwa, kegagalan dalam melakukan pembinaan teritorial cenderung menempatkan militer jauh dari basis sosialnya seperti kegagalan Amerika Serikat di Vietnam, dan Uni Soviet di Afganistan. Sebaliknya contoh yang baik dari keberhasilan militer RRC di Cina dalam membangun basis sosial yang kuat karena mereka tidak jauh dari masyarakat petani yang menjadi penyangga negara.

Untuk menghadapi setiap perkembangan yang dapat mempengaruhi kondisi masyarakat Indonesia yang bersifat multi etnik yaitu melakukan pengelolaan

terhadap norma budaya yang terdapat dalam masyarakat sehingga menciptakan ketahanan nasional yang ulet dan tangguh. Peran penting dari TNI AD dalam hal ini adalah bagaimana TNI AD dapat menjadi, bersikap dan bertindak sebagai tentara rakyat, yang selalu siap mengabdikan kepada kepentingan masyarakat.

Persoalan lain yang menghendaki perhatian dari peran TNI AD dalam membangun basis sosial yang kokoh yaitu tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap daerah abu-abu (*gray area*). Dalam realitasnya, apabila wilayah ini tidak terdeteksi secara baik, dapat mengakibatkan kondisi ketahanan nasional yang makin rentan terhadap disintegrasi dalam masyarakat, karena hal ini tidak dapat ditanggapi hanya secara hitam-putih.

Melalui pemahaman seperti itu maka perkembangan dari situasi negara yang belum mementu, telah menempatkan pola pertahanan lokal pada saat ini menjadi sangat penting. Seandainya persoalan lokal yang muncul di Indonesia tidak dapat diatasi secara arif, lambat atau cepat dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis ter-

hadap perkembangan yang tengah berlangsung saat ini, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Basis sosial TNI AD adalah rakyat, untuk itu dalam menegakkan citra TNI dalam konteks ketahanan nasional diperlukan reorientasi yang jelas dan tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa (*gradual*); (2) Bagi TNI AD perlu memformulasikan visi dan misi sesuai tuntutan reformasi ke depan yaitu, pembinaan teritorial masih tetap relevan. Namun yang terpenting dari Binter yaitu, mengembalikan citra dan memulihkan kepercayaan kepada masyarakat melalui tindakan nyata sehingga tercipta kesadaran teritorial (*territorial awariness*) yang tinggi dikalangan masyarakat, sehingga dapat dijadikan pegangan yang kuat bagi penyelenggara negara, elite politik, dan masyarakat luas; (3) Aktualisasikan kepemimpinan yang lebih mengayomi, persuasif, demokratis, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan akan selalu menempatkan TNI AD tidak jauh dari basis sosialnya; dan (4) Pengaruh sikap dan prilaku teritorial (*territorial behavior*) dari masyarakat perlu dipahami dalam konteks pembinaan teritorial karena persoalan ini selalu terkait dengan watak etnik yang berbeda-beda. Untuk itu peran penting dari TNI AD sebagai

ujung tombak dalam melakukan visi dan misi TNI sebagai simbol negara perlu diberdayakan baik secara kelembagaan maupun personil. Hal ini tetap menjadi sentral karena secara umum TNI dan secara khusus TNI AD adalah elemen dasar yang selalu diandalkan untuk menjaga keutuhan teritorial (*integration territorial*) dan kedaulatan negara (*state sovereignty*) terhadap berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik ber-sumber dari dalam maupun yang berasal dari luar, dan persoalan tersebut menyangkut keselamatan bangsa dan negara.

Daftar Pustaka

- Ichlasul Amal, Armaidly Armawi, (ed), 1997 ; *Keterbukaan Informasi, dan Ketahanan Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____ (ed) 1998; *Regionalisme, Nasionalisme dan Ketahanan Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Jacob, T, 1999 ; "Disintegrasi Moral Masyarakat dalam Prespektif Ketahanan Nasional", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps - UGM, Yogyakarta.
- Koento Wibisono S, 2001. *Demokrasi sebagai Sarana Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta : Dirjen Dikti
- Kohn. Hans. 1989. *Nasionalisme: Arti dan Sejarahnya* (Terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- Nasikun 1993. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suryosumarto, Budi Santoso. 1989. *Sistem Informasi Manajemen Nasional*. Jakarta: Aries Lima.